

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana terhampar beribu-ribu pulau dan lautan yang luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km² dan lautannya seluas 3.288.683 km². Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perhubungan laut di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dimana untuk menempuh jarak dari satu pulau dengan pulau lainnya diperlukan sarana pengangkutan laut yang memadai. Sarana pengangkutan laut ini harus dikelola, dirawat, dan diawasi pelaksanaannya secara rutin mengingat betapa pentingnya sarana pengangkutan laut di Indonesia. (Thamrin.2015)

Pelayaran adalah high regulated sector dimana adanya pengaturan yang jelas terhadap peran dari setiap pihak terkait dari pelayaran tersebut. Adanya peraturan mengenai keselamatan pelayaran yang menitikberatkan pada pengaturan pihak ketiga menjadi akibat banyaknya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh *human error*. Pada level operasional, syahbandar, pemilik kapal dan nakhoda bisa dibidang trisula keselamatan pelayaran. Ketiganya masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 3 Pelayaran tidak hanya menyangkut mengenai pengangkutan laut saja namun lebih luas lagi mencakup mengenai sarana dan prasarana yang ada serta jaminan atas keselamatan, keamanan, serta perlindungan selama berada di lingkungan maritim Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan dalam pelayaran dibutuhkan berbagai penunjang, pengawasan, serta perawatan yang rutin. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya jaminan keliaklautan dan keselamatan kapal sebagai jaminan terhadap keselamatan, keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim. (syarifudin .2017)

Dalam angkutan laut membutuhkan banyak fasilitas yang diadakan pemerintah, berupa pelabuhan-pelabuhan, dermaga, gudang-gudang laut, pandu laut, alat bongkat muat, kapal-kapal tunda, dan kapal penolong. Disamping itu fasilitas yang harus disediakan pemerintah pengamanan alur pelabuhan, rambu penerangan laut, tanda-tanda tempat dangkal, jalur masuk pelabuhan disamping kapal-kapal patroli pelayaran. Tidak lengkap hanya keadaan fasilitas pelabuhan atau dermaga, gudang, dan lain-lain sebagainya tidaklah lengkap bila tidak disertai perbaikan dooking kapal atau pembangunan-pembangunan baru kapal-kapal dalam dan luar negeri.

Tahun	Jumlah kecelakaan	Nama kapal	Keterangan korban	
2015	1	Km. Sinabung	-	Kandas
2016	-	-	-	-
2017	2	Km.kagoya Km. Kitana	Tenggelam 9 Luka ringann 2	Terbalik Tubrukan
2018	1	Km. Budi utama	Hilang 4	Lose kontak

Data ini di ambil dari kesyahbadaraan otoritas pelabuhan Banten sesuai UUD no.17 tahun 2008.

Kesyahbandarn otoritas pelabuhan kelas I Banten menjelaskan bahwa, Ditjen hubla Dit KPLP merasa perlu meningkatkan penanganan barang berbahaya sesuai berbahaya sesuai ketentuan yang di persyaratkan pada (international maritime dangerous good code) IMDG code di pelabuhan untuk lebih menjamin keselamatan pelayaran.penanganan barang-barang sesuai IMDG code. peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahirlah undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang undangan ini, dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran, sebelum undang undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran disahkan menggantikan undang-undang no 21 tahun 1992, maka ada beberapa peraturan lainnya juga yang mengatur mengenai kesyahbandaran. Peran syahbandar dalam bidang pengawasan

adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu: Material kapal, Konstruksi kapal, Bangunan kapal, Permesinan dan perlistrikan kapal. Oleh karena itu penulis ingin meneliti judul tentang **“PERAN SYAHBANDAR DALAM RANGKA KESELAMATAN BERLAYAR PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam karya tulis ilmiah adalah;

- a. Bagaimana Tugas Syahbandar dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Indonesia?
- b. Upaya Syahbandar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang peduli akan keselamatan diatas kapal?
- c. Bagaimana Proses Penerbitan surat persetujuan berlayar?
- d. Bagaimana Penanganan Syahbandar Terhadap Kelaiklautan Kapal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, secara garis besar penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Tugas Syahbandar dalam Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Berdasarkan Hukum Indonesia
- b. Untuk mengetahui cara syahbandar dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang pedulikan keselamatan diatas kapal
- c. Untuk mengetahui bagaimana Proses Penerbitan surat persetujuan berlayar
- d. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Syahbandar Terhadap Kelaiklautan Kapal

2. Kegunaan dari penulisan karya tulis ini

Dalam praktek darat, penulis ingin menerapkan teori-teori perkuliahan.

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

a. Bagi Penulis

- 1) Dapat menjelaskan bagaimana tugas syahbandar dalam menangani keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia.
- 2) Dapat menjelaskan bagaimana upaya syahbandar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang peduli akan keselamatan di kapal.
- 3) Dapat menjelaskan bagaimana proses penertiban surat persetujuan berlayar.
- 4) Dapat menjelaskan penanganan syahbandar terhadap kelaiklautan kapal.

b. Bagi UNIMAR AMNI Semarang

- 1) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak atau instansi tempat pelaksanaan Praktek Darat.
- 2) Sebagai tolak ukur untuk mengetahui kualitas serta kesiapan taruna UNIMAR AMNI Semarang dalam menghadapi dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan pembanding antara teori dengan pembelajaran di kampus dengan prakteknya di instansi terkait.

c. Bagi pembaca

- 1) Sebagai bahan pembelajaran yang nantinya akan bermanfaat ketika turun langsung di dunia kerja yang *deck* kapal.
- 2) Karya Tulis ini bisa menjadi sumbangan pemikiran dan sumber Analisa kepada paa pembaca, baik di lingkungan kampus UNIMAR AMNI Semarang, ataupun di luar kampus sebagai masukan yang dapat di kembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan maka karya tulis ini di susun dan sebelum memasuki bab per bab maka terlebih dahulu diawali dengan lembar judul dan lembar persetujuan moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, serta daftar lampiran. Maka penyusunan akan di bagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Penulis Menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Penulis Akan Melanjutkan Uraian Tentang Tinjauan Pustaka Berisi Teori-teori Yang Di Gunakan Dalam Menyusun Karya Tulis. Baik Teori Yang Berasal Dari Buku-buku. Jurnal Ilmiah Maupun Media Cetak atau *Online*.

BAB 3 METODOLOGI PENGAMATAN

Dalam Penulisan Karya Tulis. Metode Pengumpulan Data Merupakan Faktor Penting Demi Keberhasilan Penyusunan Karya Tulis, Hal ini Berkaitan Bagaimana Cara Mengumpulkan Data, Siapa Sumbernya Dan Apa Alat Yang Di Gunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Berisikan Gambaran Umum Obyek Pengamatan, Tempat Observasi, Struktur Organisasi, Gambaran Kondisi Perusahaan, dan Intansi-intansi Terkait.

BAB 5 PENUTUP

Penulis Akan Memberikan Kesimpulan Seluruh Pembahasan Beserta Solusi Atau Capaian Yang Di Hasilkan Dan Berisi Saran Untuk Memperbaiki Permasalahan Yang Muncul Sesuai Dengan Judul Dan Tema Karya Tulis. Dan Bagian Akhir Berisikan Daftar Pustaka dan

Lampiran Secara Sistematis, Aktual Dan Akurat Mengenai
Pengamatan Dan Observasi Selama Praktek Darat.